

## **KEBIJAKAN *LOCAL CURRENCY SETTLEMENT* DI INDONESIA**

**Sulfarid, Ibnu Haris**

Prodi MBS, FEBI Institut Daarul Qur'an, Indonesia

Korespondensi. author: farid.idaqu@gmail.com<sup>1</sup>, ibnuharis17527@gmail.com<sup>2</sup>

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to discuss policy Local Currency Settlement in Indonesia. In order to facilitate the understanding of this research, we rely on secondary data from several scientific publications that discuss political-economic policies concerning bilateral cooperation between countries using local currencies. We search for data with the help of an-nur onyx on high-impact publications such as text publications, several journals in economics, international relations & politics, Google Books, and several other scientific publications. After data collection, the next analysis process is a review involving the coding system and in-depth evaluation to understand so that it can answer questions and produce valid and reliable results. Based on the data findings and discussion, it can be concluded that based on these findings, the government's policy regarding settlement of transactions using current local with several countries, received special attention from the government because it was believed to provide benefits and advantages for the country, one of which, growing the value of the rupiah currency, economic growth through exports-imports, increasing economic-political cooperation relations between countries and of course increasing the economy in the tourist.*

**Keywords:** *LCS policies, transactions and currencies*

### **ABSTRAK**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk membahas kebijakan *Local Currency Settlement* di Indonesia. Demi memudahkan pemahaman penelitian ini, kami mengandalkan data sekunder dari beberapa publikasi ilmiah yang membahas kebijakan ekonomi-politik yang menyangkut kerjasama bilateral antar negara dengan menggunakan mata uang lokal. Kami mencari data dengan bantuan an-nur onyx pada publikasi berdampak tinggi seperti publikasi teks, beberapa jurnal ekonomi, hubungan internasional & politik, *Google Books*, dan beberapa publikasi ilmiah lainnya. Setelah pengumpulan data, proses analisis selanjutnya adalah tinjauan yang melibatkan sistem pengkodean dan evaluasi mendalam untuk memahami sehingga dapat menjawab pertanyaan dan hasil yang valid dan andal. Berdasarkan temuan data dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan temuan tersebut, kebijakan pemerintah mengenai penyelesaian transaksi dengan menggunakan mata uang local dengan beberapa negara, mendapat perhatian khusus dari pemerintah karena diyakini akan memberikan manfaat dan keuntungan bagi negara, salah satu diantaranya, menumbuhkan nilai mata uang rupiah, pertumbuhan ekonomi melalui ekspor- impor, meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi-politik antar negara dan tentunya meningkatkan perekonomian di sektor pariwisata.

**Kata Kunci:** kebijakan LCS, transaksi, dan mata uang

## PENDAHULUAN

Berbagai negara mulai mengurangi efek dominasi mata uang Dolar Amerika Serikat dalam hal pembayaran atau transaksi perdagangan. Rusia mendolarisasi neraca perdagangannya, aset bank hingga perusahaan energi raksasa mereka juga turut menggunakan Rubel (mata uang Rusia) sebagai mata uang dalam kegiatan transaksi. Tidak hanya Rusia, China yang muncul sebagai kekuatan ekonomi raksasa di Asia mulai meninggalkan Dolar dan menggunakan Yuan sebagai alat transaksi dengan beberapa negara. Bank sentral di China dan Uni Eropa juga membuat perjanjian perdagangan dengan negaranegara lainnya untuk menggunakan mata uang mereka masing-masing dan mengabaikan sanksi dari Amerika Serikat. Uni Eropa juga membuat instrumen Instex dengan negaranegara mitra mereka agar dapat melakukan transaksi tanpa harus takut mendapat sanksi dari Amerika Serikat (Rinaldi, 2020). Pada April 2019, keempat negara ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina menandatangani kesepakatan penggunaan uang lokal sebagai mata uang transaksi perdagangan bilateral, sehingga penggunaan Rupiah semakin luas di kalangan negara ASEAN. Hal ini menjadi peluang bagi Indonesia dalam menguatkan nilai tukar Rupiah. Nilai tukar Rupiah juga mendapatkan sentimen positif setelah mulai menurunnya tensi perang dagang AS - China yang ditandai dengan pembelian barang AS pada tanggal 15 Januari 2020 senilai USD 200 miliar, dengan turunnya tensi perang dagang AS-China, Indonesia memiliki peluang yang baik untuk mengurangi penggunaan Dolar Amerika Serikat, terlebih saat volume perdagangan Internasional Indonesia pada November 2019 mencapai USD 309.272 juta (Rinaldi, 2020)

Dolar Amerika Serikat pada mulanya menjadi mata uang transaksi di berbagainegara karena di pandang stabil, hal ini dikarenakan Amerika Serikat mempunyai nilai bisnis yang tinggi dengan negara- negara di dunia. Transaksi yang menggunakan Dolar AS kemudian menjadi lebih luas tidak hanya bagi kegiatan perdagangan dengan Amerika Serikat saja, namun juga negara-negara yang tidak memiliki hubungan perdagangan dengan Amerika turut menggunakan Dolar AS saat transaksi (Frassminggi, 2014). Kebiasaan ini menjadikan negaranegara di dunia memiliki ketergantungan pada Dolar AS, akibatnya negara-negara di dunia harus tunduk patuh terhadap yurisdiksi AS untuk menghindari sanksi ekonomi yang dibuat oleh AS. Seperti kesewenang- wenangan AS saat memutus sepihak perjanjian nuklir Iran 2015 pada tahun 2018 dan mengancam perusahaan asing yang melakukan hubungan bisnis dengan Iran. Setelah kebijakan tersebut diberikan, perusahaan energi milik Perancis bernama Total akhirnya harus bersiap untuk meninggalkan proyek ladang gas alamnya yang sudah dimulai pasca perjanjian nuklir dengan Iran tahun 2015. Sanksi yang diberikan oleh AS saat mengancam tersebut membahayakan perusahaan multinasional seperti Total dan perusahaan Uni Eropa lainnya yang ingin berbisnis dengan Iran. Oleh sebab itu, negara-negara Uni Eropa berani mengambil langkah tidak menggunakan Dolar AS dan mengurangi dominasi Dolar AS di Uni Eropa (Sebayang, 2019).

Saat negara-negara di Eropa maupun China dan Korea Selatan mengurangi ketergantungan transaksi internasional menggunakan mata uang Dolar AS, Indonesia juga memanfaatkan peluang tersebut dan mulai mengadakan kesepakatan perdagangan internasional dengan menggunakan sistem pembayaran Local Currency Settlement (Transaksi menggunakan mata uang lokal). Selain dengan negara ASEAN, Indonesia melakukan kesepakatan dengan Jepang dan China untuk menjadikan LCS sebagai sistem pembayaran terlebih pada transaksi perdagangan. Pada 22 September 2020 lalu Indonesia menandatangani nota kesepahaman dengan China mengenai LCS dan pada bulan Agustus 2021 Indonesia lewat Bank Indonesia dan China diwakili People's Bank of China sepakat untuk menerapkan LCS atau penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan kedua negara. Hal ini disambut antusias oleh pelaku usaha dari kedua negara, perbankan serta Apindo sebagai organisasi para pengusaha (Kemendag RI, 2021).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral menggunakan Mata Uang Lokal yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia No. 23/16/PADG/2021 untuk mendukung penerapan LCS Bank Indonesia dan People's Bank of China menunjuk bank-bank di kedua negara yang memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan transaksi pembayaran dengan mata uang lokal. Bank-bank yang telah ditunjuk oleh kedua negara ini disebut sebagai bank fasilitator atau Appointed Cross Currency Dealer (ACCD). Beberapa syarat untuk menjadi bank ACCD antara lain telah berpengalaman dalam memberikan fasilitas transaksi perdagangan dan investasi di kedua negara. Bank-bank tersebut harus memiliki kapasitas dalam penyelenggaraan berbagai jasa keuangan serta memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan bank di negara mitra (BI, 2021).

Dedolarisasi Indonesia: Dorong Penggunaan Mata Uang Rupiah Pada dasarnya mata uang suatu negara merupakan suatu aspek yang sangat penting bagi proses perekonomian, baik dalam skala nasional maupun internasional. Dalam konteks perdagangan internasional, misalnya, mata uang yang digunakan sebagai alat transaksi juga berperan penting bagi terjadinya kesepakatan perdagangan. Sebelumnya, diketahui bahwa mata uang dolar AS mendominasi sebagai mata uang cadangan yang digunakan sebagai adopsi nilai tukar utama di lingkungan internasional. Dengan status tersebut, dunia internasional seolah bergantung pada dolar AS. Baik untuk kepentingan transaksi ekspor maupun impor, harus menyesuaikan dengan nilai dolar AS. Namun dalam perkembangannya, nilai mata uang dolar AS yang fluktuatif dinilai telah menggoyahkan daya tahan perekonomian banyak negara. Alhasil, beberapa negara dunia pun kemudian melakukan kesepakatan baik secara bilateral maupun multilateral, demi mencari jalan keluar untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS. Adapun gerakan dan kebijakan dedolarisasi ini sudah menjadi fenomena global yang diambil oleh negara-negara maju. Tak mau ketinggalan, Indonesia juga melakukan upaya dedolarisasi melalui berbagai skema, yaitu skema perjanjian bilateral currency swap arrangement (BCSA), local currency

settlement (LCS), maupun dengan LCT. Selain dilakukan untuk menurunkan ketergantungan terhadap dolar AS, upaya dedolarisasi ini dilakukan dalam rangka meningkatkan stabilitas ekonomi dan penguatan mata uang lokal Indonesia, yaitu Rupiah (Sabila, 2023).

Kedepannya implementasi LCS diharapkan oleh berbagai pihak terutama pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha untuk meningkatkan kerja sama ekonomis serta mengurangi tingkat resiko nilai valuta asing, pelaku eksportir dan importir juga akan mendapatkan perlindungan efisiensi harga, investasi dan perdagangan serta efektivitas transaksi pertukaran mata uang kedua negara dengan harga rendah (Kemendag RI). Namun kebijakan LCS tentu tidak dapat menghilangkan dominasi dolar sepenuhnya, dan resiko baru dalam penerapan tidak dapat dihindarkan, misal saja resiko yang diakibatkan inflasi, gejala politik kedua negara, perbedaan kebijakan fiskal dan moneter di kedua negara. Untuk itu maka peneliti ingin mengkaji kelebihan, kekurangan, peluang, dan hambatan dari kebijakan LCS (Aprilia, 2023).

## **METODE PENELITIAN**

Bagian ini akan membahas bagaimana penelitian ini dilakukan untuk membahas kebijakan *Local Currency Settlement* (LCS) Negara Indonesia dengan beberapa Negara seperti Cina, Malaysia, Thailand dan Korea Selatan. Untuk memahami pertanyaan penelitian ini, kami mengandalkan data sekunder dari beberapa publikasi ilmiah yang membahas ilmu ekonomi, politik dan hubungan internasional. Kami mencari data dengan bantuan aplikasi elektronik seperti pencarian Google pada publikasi ilmu ekonomi dan bisnis yang berdampak tinggi seperti publikasi Taylor dan Francis, Google Books, dan beberapa publikasi ilmiah lainnya (Sherif, 2018). Setelah pengumpulan data, proses selanjutnya adalah analisis dan tinjauan yang melibatkan sistem pengkodean dan evaluasi mendalam untuk memahami inti masalah ini untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan hasil atau temuan baru yang valid dan andal. Adapun desain, kami mengikuti pedoman studi kualitatif deskriptif ilmu pengetahuan dan studi ekonomi (Nassaji, 2015).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kebijakan LCS Indonesia - Cina**

Dedolarisasi dolar Amerika Serikat menjadi salah satu upaya dan strategi untuk menstabilkan nilai mata uang Rupiah. Dedolarisasi juga sebagai strategi apabila dolar AS melemah dan dapat mempengaruhi mata uang lainnya. Salah satu upaya untuk mengurangi penggunaan dolar AS adalah menggunakan sistem pembayaran dengan mata uang lokal atau *Local Currency Settlement*. Pada transaksi dengan sistem LCS Indonesia dan China kedua negara menggunakan mata uangnya masing-masing yakni Rupiah dan Yuan dalam pembiayaan perdagangan dan investasi. Penerapan LCS difasilitasi oleh bank khusus yang ditunjuk oleh sentral kedua negara yang disebut Bank ACCD. Pengusaha dan investor di kedua negara dapat membuka rekening nasabah LCS melalui bank

tersebut dengan pedoman mekanisme peraturan yang sudah ditentukan oleh bank sentral kedua negara.

Penyelesaian transaksi menggunakan LCS memiliki kelebihan, kelemahan, peluang, dan hambatan. Kelebihan dari penerapan LCS antara lain kemudahan dalam pengajuan nasabah LCS, efisiensi transaksi, dan standarisasi mata uang dengan menggunakan SNAP. Kelemahan LCS ialah sebagai kebijakan moneter maka dapat mudah dipengaruhi oleh kondisi politik di negara Indonesia dan China, kuotasi nilai tukar mata uang tidak bisa selalu sama dan akan berubah sesuai pasar keuangan dunia, dan salah satu negara dapat lebih diuntungkan atau dirugikan akibat persaingan perdagangan dan investasi yang mempengaruhi nilai tukar mata uang lokal. Tidak hanya kelebihan dan kelemahan, peluang dari penerapan LCS berdampak pada diversifikasi mata uang yang dapat meminimalisir penurunan nilai investasi dan ketergantungan kepada satu mata uang tunggal seperti dolar AS, meningkatnya daya ekspor Indonesia ke China dengan kemudahan mengakses layanan LCS bagi pelaku usaha besar maupun UMKM Indonesia, membuka pasar ekspor Indonesia lebih besar di China dan penyerapan tenaga kerja, serta terjadinya stabilitas ekonomi. Tantangan yang dialami dalam penerapan LCS Indonesia dan China meliputi ancaman ketegangan dan keamanan global, ancaman sanksi ekonomi dari Amerika Serikat, ancaman keamanan data seperti Card Skimming, Carding, dan Phising, krisis keuangan seperti inflasi, ketergantungan perekonomian terhadap China dan ancaman kebijakan devaluasi mata uang China yang dapat mempengaruhi ekonomi Indonesia. Adanya penerapan LCS memiliki banyak manfaat bagi Indonesia yaitu volume perdagangan Indonesia dan China semakin meningkat dengan kemudahan dalam pembayaran menggunakan mata uang lokal serta hubungan bilateral Indonesia di bidang perdagangan dan investasi semakin erat. Kedepannya penelitian terbaru diharapkan dapat membahas lebih jauh mengenai penerapan LCS di negara China dan negara-negara lain sebagai mitra dagang Indonesia sekaligus membahas pengaruh LCS terhadap peningkatan daya ekspor Indonesia dan China.

### **Kebijakan LCS Indonesia – Malaysia & Thailand**

Kerja Sama local currency settlement (LCS) Indonesia, Malaysia, dan Thailand dilandaskan pada tujuan yang sama, yakni untuk mencapai kestabilan nilai mata uang lokal, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat sektor perdagangan dan investasi. Selain itu, tujuan lain dari kerja sama LCS adalah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dan resiko keuangan lainnya. Indonesia, Malaysia, dan Thailand sama-sama memiliki pengalaman buruk atas krisis keuangan/ekonomi yang terjadi pada 1997. Dimana ketiga negara terdampak krisis yang menjalar seperti efek domino (Krisis Keuangan Asia). Enrique O'Farrill dkk (1999) menjelaskan bahwa kerja sama ekonomi merupakan jawaban atas munculnya tantangan baru dalam proses globalisasi dan integrasi komersial. Tidak hanya dalam hubungan politik antar negara tetapi juga dalam hubungan ekonomi yang terjalin dalam konteks internasional. Adanya kerja sama LCS

tentunya memberi ruang bagi Indonesia, Malaysia, dan Thailand untuk secara bersama mencapai tujuan dan memperoleh manfaat dari pelaksanaan LCS tersebut (O'Farrill, Fierro, Moraga, Pérez, & Vallejos, Economic cooperation AGCI, 1999).

Peneliti dalam hal ini menganalisis kerja sama internasional LCS Indonesia-Malaysia-Thailand menggunakan fitur-fitur konsep kerja sama yang ditawarkan oleh Enrique O'Farrill dkk (1999); 1. Economic benefit: Kerja Sama LCS Indonesia-Malaysia-Thailand didasarkan karena adanya upaya dari ketiga negara untuk mencapai tujuan bersama yakni dengan mengurangi ketergantungan terhadap dolar, meningkatkan stabilitas keuangan negara, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di ketiga negara melalui penguatan sektor perdagangan, 2. Emphasis on the relationship between partners: Hubungan diantara mitra kerja sangat penting untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaan kerja sama tersebut sehingga dapat memperoleh mutual benefit. Indonesia, Malaysia, dan Thailand merupakan tiga negara yang telah lama membangun hubungan baik, Selain tergabung dalam lingkup ASEAN, ketiga negara juga juga tergabung dalam lingkup kerja sama sub-regional (IMT-GT). Adanya kerja sama LCS Indonesia-Malaysia Thailand dapat memperkuat hubungan dari ketiga negara khususnya dibidang ekonomi keuangan, perdagangan dan investasi. 3. Inclusion of the Private Sector: proses kerja sama bidang ekonomi akan secara langsung berkaitan dengan proses integrasi perdagangan.

Kerja Sama LCS sangat berkaitan dengan integrasi perdagangan dari sisi transaksi. Dimana kerja sama ini mendorong penggunaan mata uang lokal sebagai alternatif transaksi kegiatan perdagangan. 4. The changing role of the state: Negara mengambil peran utama kerja sama ekonomi untuk memastikan pencapaian kualitas terbaik di arena internasional. Demikian pula, dan keterlibatan sektor swasta yang menjadi elemen penentu dalam proses kerja sama. Dalam kasus kerja sama LCS Indonesia-Malaysia-Thailand, negara melalui otoritas terkait (bank sentral) bertindak sebagai peran utama dalam berlangsungnya kerja sama dibantu dengan Bank ACCD selaku fasilitator. Dalam pelaksanaan dan pengembangan kebijakan penerapan LCS, negara juga melibatkan pihak-pihak lainnya seperti institusi/lembanga/asosiasi pengusaha hingga pada pelaku usaha sebagai elemen penentu dalam proses kerja sama. 5. *Secure indirect short and medium term*: Tindakan atau kegiatan yang dilakukan dalam kerangka kerja sama ekonomi terfokus atau berpusat pada penciptaan kondisi untuk memfasilitasi perdagangan dan keterampilan kompetitif di pasar dunia. Pelaksanaan kerja sama local currency Indonesia-Malaysia-Thailand didasarkan pada upaya mendorong dan memfasilitasi sektor perdagangan dengan menggunakan transaksi mata uang lokal.

Dalam periode 2018-2021 Kerja Sama LCS Indonesia, Malaysia-Thailand berhasil menunjukkan tren yang baik (positif) dengan kenaikan nilai pada periode tersebut. LCS tentunya memiliki room to grow untuk memperkuat manfaat dari pelaksanaan LCS itu sendiri (O'Farrill, Fierro, Moraga, Pérez, & Vallejos, Economic cooperation AGCI, 1999). Penjelasan fitur-fitur kerja sama ekonomi

yang ditawarkan oleh Enrique O'Farrill dkk di atas, menunjukkan bahwa kerja sama LCS Indonesia-Malaysia-Thailand mempunyai fitur-fitur lengkap, sehingga pelaksanaan LCS tentu mampu menjadi promotor kerja sama bidang ekonomi bagi Indonesia, Malaysia, dan Thailand khususnya dalam memfasilitasi perdagangan. Dengan demikian, upaya penguatan LCS dapat mengakselerasi capaian tujuan kerja sama tersebut.

Kerja sama ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand dalam memperkuat penerapan *local currency settlement* (LCS) dalam memfasilitasi perdagangan dapat menjadi wadah baru dari skema sub-regional. Terlebih menang Indonesia, Malaysia dan Thailand juga tergabung dalam IMT-GT (sub-regional) yang mempunyai objektif utama mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diantara ketiga negara.

Chaia Siow Yue (1997) dalam tulisan Budi Ryanto (2015) menjelaskan bahwa salah satu unggulan dan manfaat dalam kerja sama sub regional di antaranya yaitu mudah dilaksanakan dan dikelola secara politik, serta dianggap lebih fleksibel secara fungsi karena kerja sama sub regional tidak memiliki ketentuan-ketentuan yang ketat, dalam arti menyesuaikan dengan kesepakatan pelaku kerja sama. Pelaksanaan kerja sama sub-regional pada dasarnya memiliki lingkup yang kecil, namun, hal ini menjadi alternatif dari berbagai kendala dan hambatan yang timbul atas *framework* dari kegiatan ekonomi yang jauh lebih kompleks pada level regional (Riyanto, 2015). Penerapan kerja sama LCS Indonesia-Malaysia-Thailand didasarkan pada tantangan dan kondisi yang sama. Ketiga negara memiliki pengalaman buruk atas krisis keuangan yang pernah terjadi. Selain itu, ketiga negara secara geografis berada pada wilayah yang berdekatan dengan status sebagai mitra dagang besar di lingkup Asia Tenggara. Ketiga negara memiliki tujuan dan kepentingan yang sama, yaitu untuk mengurangi ketergantungan dan menghindari segala risiko dari penggunaan dolar. *Local Currency Settlement* (LCS) sebagai tawaran alternatif transaksi perdagangan dapat berperan penting dalam mempercepat objektif dari kerja sama ekonomi sub-regional pada area (*working group*) perdagangan. Pelaksanaan LCS selama periode 2018-2021 telah menunjukkan trend positif dari nilai transaksi yang mengalami kenaikan setiap tahunnya walaupun belum menunjukkan nilai yang signifikan. Upaya dalam memperkuat sektor perdagangan melalui penggunaan transaksi LCS telah dilakukan oleh berbagai stakeholder sebagai wujud pengembangan kebijakan LCS. Pengembangan LCS yang dilakukan tentunya dapat kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam memperkuat hubungan kerja sama ekonomi Indonesia, Malaysia, dan Thailand, khususnya sebagai kelompok sub-regional. Sehingga kedepan ketiga negara dapat menjadi mitra ekonomi mapan khususnya di sektor perdagangan.

Pelaksanaan *local currency settlement* (LCS) Indonesia, Malaysia dan Thailand sudah menunjukkan perkembangan yang baik dengan adanya trend positif dari kenaikan nilai transaksi sejak efektif dilaksanakan pada tahun 2018. Penguatan perdagangan melalui penggunaan *local currency settlement* sangat diperlukan dalam rangka mencapai stabilitas keuangan negara, meningkatkan

pertumbuhan ekonomi melalui laju perdagangan yang progresif, dan mengurangi ketergantungan dolar AS beserta risiko keuangan lainnya, Dengan demikian, penguatan perdagangan melalui LCS dapat menjadi promotor kerja sama ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand.

Adapun proses dalam memperkuat penggunaan LCS untuk mendorong kerja sama ekonomi perdagangan, yakni dengan melalui dua cara. Pertama penguatan peran stakeholder dalam pelaksanaan local currency settlement. Bank Indonesia sebagai internal stakeholder melakukan penerapan strategi quick wins dan communication campaign untuk memperkuat pelaksanaan LCS dalam mencapai pemulihan ekonomi nasional. kementerian, lembaga, dan asosiasi yang relevan sebagai external stakeholder dapat menjalankan peran strategis yang lebih kompleks melalui *National Task Force* (Gugus Tugas Nasional) Local Currency Settlement. Kolaborasi antara stakeholder tentu dapat mendorong pengembangan, akselerasi, dan perluasan manfaat dari penggunaan LCS untuk mendorong stabilitas sistem keuangan dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kedua, mendorong pelaku usaha produk unggulan dan potensial untuk menggunakan transaksi LCS sebagai alternatif penyelesaian transaksi perdagangan. Dengan mendorong pelaku usaha sektor produk unggulan dan potensial yang memiliki nilai persentase share yang tinggi.

### **Kebijakan LCS Indonesia – Korea**

Transaksi ekonomi dan keuangan antara Indonesia dan Korea Selatan ke depan tak lagi harus menggunakan Dollar Amerika Serikat. Pasalnya, Bank Indonesia dan Bank of Korea telah menyepakati kerja sama untuk mendorong penggunaan mata uang lokal masing-masing negara dalam transaksi bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan atau *Local Currency Settlement* (LCS). Kesepakatan tersebut dituangkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dan Gubernur Bank of Korea, RHEE, Chang Yong, sela-sela Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN 3 di Korea Selatan. Dalam keterangan resminya, Gubernur Bank Indonesia mengatakan bahwa Kesepakatan ini akan mendorong penggunaan mata uang lokal masing-masing negara dalam transaksi bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan, seperti transaksi berjalan (*current account transaction*), investasi langsung, dan transaksi ekonomi dan keuangan lainnya yang akan disepakati kedua otoritas, kolaborasi ini menandai capaian penting dalam memperkuat kerja sama keuangan bilateral antara Bank Indonesia and Bank of Korea. (Petrus. 2023)

Deputi Gubernur Bank Indonesia menyatakan akan segera menyelesaikan perjanjian kerja sama dengan Korea Selatan dan India terkait penggunaan transaksi mata uang lokal atau *Local Currency Settlement* (LCS). Pemerintah menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah menuju kepada penyesuaian *framework* terkait kerja sama tersebut, *framework* tersebut tidak saja menyoal transaksi perdagangan dan investasi tetapi juga transaksi pasar keuangan termasuk prosedur pembayarannya. Pemerintah mengungkapkan bahwa terkait kerja sama dengan Korsel dan India pihaknya sudah dalam tahapan



penandatanganan yang akan terealisasi dalam waktu dekat termasuk kerja sama *cross border payments* Sebagai informasi, *cross border payments* merupakan transaksi keuangan yang memungkinkan pembayar dan penerima berada di negara yang berbeda. Sistem ini turut memudahkan turis untuk bertransaksi karena tidak perlu lagi menukar uang fisik ke mata uang lokal setempat. Terkait perkembangan nilai transaksi perdagangan LCS dengan negara-negara mitra sebelumnya. Di mana, nilai transaksi LCS terbesar berasal dari negara China dan Jepang. . (Arif. 2023)

Pelaku usaha dapat memanfaatkan kerja sama ini untuk mengurangi biaya transaksi dan eksposur terhadap risiko nilai tukar dalam melakukan transaksi bilateral kedua negara, antara lain melalui penggunaan kuota nilai tukar secara langsung antara mata uang Korean Won dan Rupiah dalam perdagangan antarbank. Kerja sama ini akan terus diperkuat melalui sharing informasi dan diskusi secara berkala antara otoritas Indonesia dan Korea Selatan, Otoritas kedua negara, memandang bahwa penggunaan mata uang lokal masing-masing negara yang lebih luas untuk transaksi bilateral pada akhirnya akan berkontribusi dalam mempromosikan perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan serta memperdalam pasar keuangan dalam mata uang lokal di kedua negara. (Petrus. 2023)

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Indonesia dan Korea dapat menggunakan mata uang lokal masing-masing untuk transaksi-transaksi bilateral antara keduanya. Sebagai contoh yaitu transaksi berjalan, investasi langsung, dan transaksi ekonomi serta keuangan lainnya yang telah disepakati. Mengutip dari Siaran Pers BI Nomor.25/108/DKCom, pelaku usaha dapat memanfaatkan kerja sama ini untuk mengurangi biaya transaksi dan eksposur terhadap risiko nilai tukar dalam melakukan transaksi antar negara. Selain bertujuan menguatkan kerja sama dalam keuangan antar negara, kerja sama ini juga dilakukan dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (AS) atau “dedolarisasi” (Sabila, 2023).

### **Dampak Skema *Local Currency Transaction* (LCT)**

Penggunaan pembayaran lintas batas menggunakan mata uang lokal atau yang disebut sebagai skema *local currency transaction* (LCT) merupakan salah satu bentuk kebijakan dedolarisasi Indonesia. Skema LCT dapat memudahkan masyarakat untuk bisa berbelanja di negara tujuan menggunakan mata uang lokal dan cenderung digunakan untuk transaksi ritel. Sebagaimana dikutip dari CNBC, salah satu perwujudan LCT adalah implementasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) antarnegara. QRIS antarnegara adalah sistem pembayaran lintas negara (cross-border payment) berbasis kode QR yang dapat digunakan untuk transaksi lintas negara. Dengan QRIS antarnegara, transaksi antar negara tidak perlu lagi mengkonversi atau menukarkan mata uang lagi saat berbelanja di negara yang dikunjunginya, cukup dengan memindai kode QR. Kepala Ekonom BCA, David Sumual, menjelaskan, adanya kerja sama transaksi mata uang lokal, memudahkan masyarakat melakukan transaksi saat

memiliki kebutuhan di luar negeri. Misalnya untuk pengusaha yang biasa melakukan ekspor-impor, mereka bisa melakukan transaksi dengan mitra dagang atau investasinya dengan langsung menggunakan mata uang lokal masing-masing negara. Adapun dari informasi yang didapat dari BI, data terkini menunjukkan transaksi menggunakan mata uang lokal dalam instrumen LCT, hingga Februari 2023, transaksinya telah mencapai 957 juta US dolar. Nilai tersebut meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan realisasi transaksi LCT pada 2022. (Sabila, 2023)

## KESIMPULAN

Kebijakan Dedolarisasi dolar Amerika Serikat menjadi salah satu upaya dan strategi untuk menyetabilkan nilai mata uang Rupiah. Kebijakan itu juga sebagai strategi apabila dolar AS melemah dan dapat mempengaruhi mata uang lainnya. Salah satu upaya untuk mengurangi penggunaan dolar AS adalah menggunakan sistem pembayaran dengan mata uang lokal atau *Local Currency Settlement*. Pada transaksi dengan sistem LCS Indonesia dengan beberapa negara seperti Cina, Malaysia, Thailand dan Korea menggunakan mata uangnya masing-masing dalam pembiayaan perdagangan dan investasi. Penerapan LCS difasilitasi oleh bank khusus yang ditunjuk oleh sentral negara-negara yang disebut Bank ACCD. Pengusaha dan investor di kedua negara dapat membuka rekening nasabah LCS melalui bank tersebut dengan pedoman mekanisme peraturan yang sudah ditentukan oleh bank sentral kedua negara. Penyelesaian transaksi menggunakan LCS memiliki kelebihan kekurangan beberapa kelebihan diantaranya kemudahan dalam pengajuan nasabah LCS, efisiensi transaksi, dan standarisasi mata uang dengan menggunakan SNAP. Kelemahan LCS ialah sebagai kebijakan moneter maka dapat mudah dipengaruhi oleh kondisi politik di negara Indonesia kuotasi nilai tukar mata uang tidak bisa selalu sama dan akan berubah sesuai pasar keuangan dunia, dan salah satu negara dapat lebih diuntungkan atau dirugikan akibat persaingan perdagangan dan investasi yang mempengaruhi nilai tukar mata uang lokal. Tidak hanya kelebihan dan kelemahan, peluang dari penerapan LCS berdampak pada diversifikasi mata uang yang dapat meminimalisir penurunan nilai investasi dan ketergantungan kepada satu mata uang tunggal seperti dolar AS, meningkatnya daya ekspor Indonesia ke negara lain dengan kemudahan mengakses layanan LCS bagi pelaku usaha besar maupun UMKM Indonesia, membuka pasar ekspor Indonesia lebih besar dan penyerapan tenaga kerja, serta terjadinya stabilitas ekonomi. Tantangan yang dialami dalam penerapan LCS Indonesia meliputi ancaman ketegangan dan keamanan global, ancaman sanksi ekonomi dari Amerika Serikat, ancaman keamanan data seperti *Card Skimming*, *Carding*, dan *Phising*, krisis keuangan seperti inflasi, ketergantungan perekonomian terhadap negara -negara yang melaksanakan kerjasama LCS dengan Indonesia dan ancaman kebijakan devaluasi mata uang negara tersebut yang dapat mempengaruhi ekonomi Indonesia. Adanya penerapan LCS memiliki banyak manfaat bagi Indonesia yaitu volume perdagangan Indonesia semakin meningkat dengan kemudahan dalam pembayaran menggunakan mata uang lokal

serta hubungan bilateral Indonesia di bidang perdagangan dan investasi semakin erat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, L. (2017). Membangun daya saing tenaga kerja Indonesia melalui peningkatan produktivitas. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 11(2), 71–84.
- Adi, L. (2017, November 22). Intensitas Perdagangan Intra-Regional dalam ASEAN3 (Indonesia, Malaysia, dan Thailand). *Journal of Research in Economics and Management*, 17, 313-322. doi:10.17970/jrem.17.1702012.
- Agustino, L. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Aldy, N. & Hasan, S. (2022). Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand: Penguatan Local Currency Settlement (LCS) Framework dalam Memfasilitasi Perdagangan. *Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR)* e-ISSN:2684-8082 Vol. 4 No.2, Agustus 2022 (164-178)
- Anggraeni, R. (2022). Ini Jenis-Jenis Kejahatan Digital Perbankan dan Tips Menghindarinya! <https://finansial.bisnis.com/read/20220507/90/1530596/in-i-jenis-jenis-kejahatandigital-perbankan-dan-tips-menghindarinya>
- Aprilia, D. R., & Suyeno. (2022, Mei). Analisis SWOT Kebijakan Local Currency Settlement Indonesia-China. *Jurnal Aplikasi Administrasi* Vol. 25 No. 1, 13-25.
- Arif, F., Noverius, L., (2023). BI Segera Selesaikan Kerjasama Transaksi LCS dengan Korea Selatan dan India. <https://nasional.kontan.co.id/news/bi-segera-selesaikan-kerjasama-transaksi-lcs-dengan-korea-selatan-dan-india>
- Avianto, B. R., & Koestoer, R. H. (2010, Juni). Distorasi Kapasitas Perdagangan Inter-regional IMT-GT. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11, 44-57.
- Bank Indonesia. (2020). Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal Melalui Bank. BI. (2021). Peraturan Anggota Dewan Gubernur No 23/ 16 /PADG/2021 tentang Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Tiongkok Menggunakan Rupiah dan Yuan melalui Bank. [https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PADG\\_231621.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PADG_231621.aspx)
- Br Silitonga, R., Ishak, Z., Mukhlis, D., Jurusan, M., Pembangunan, E., Ekonomi, F., Sriwijaya, U., & Pembangunan, J. E. (2017). Pengaruh ekspor, impor, dan inflasi terhadap nilai tukar rupiah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1), 53–59. <https://doi.org/10.29259/JEP.V15I1.8821>
- Br Silitonga, R., Ishak, Z., Mukhlis, D., Jurusan, M., Pembangunan, E., Ekonomi, F., Sriwijaya, U., & Pembangunan, J. E. (2017). Pengaruh ekspor, impor, dan inflasi terhadap nilai tukar rupiah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1), 53–59. <https://doi.org/10.29259/JEP.V15I1.8821>
- Elena, M. (2021). Transaksi LCS RI dan China Capai US\$15 Juta per Bulan, Ini Komentar BI. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211223/9/1481184/transaksi-lcs-ri-dan-chinacapai-us15-juta-per-bulan-ini-komentar-bi>
- Erwin Haryono. (2022, Mei 27). Pembentukan Gugus Tugas Nasional Local Currency Settlement (LCS). Diambil kembali dari Bank Indonesia: [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_2414022.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2414022.aspx)
- Frassminggi, K. (2014). Dari bretton woods ke petro-dollar: analisis dan evaluasi kritis sistem moneter internasional. *Global Dan Strategis*, Vol. 8 No., 233–254. <http://journal.unair.ac.id/JGS@dari-bretton-woods-ke-petro-dollar-->

- analisis-danevaluasi-kritis-sistem-moneter-internasional-article-7711-media-23-category-8.html
- Hafsah, S., Ahmad, J. (2021). Penggunaan Mata Uang Lokal Dalam Perdagangan Indonesia, Malaysia Dan Thailand. *JOM FISIP* Vol. 8: Edisi II Juli-Desember, 1-9
- Kemendag RI. (n.d.). Laporan Triwulan (LAPTRI) Kementerian Perdagangan 2021 - Triwulan II - Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Retrieved September 16, 2022, from <https://www.kemendag.go.id/id/about-us/strategic-planning/laporan-triwulan-laptrikementerian-perdagangan-2021-triwulan-ii-1>
- Kementerian Perdagangan. (2022). Produk Unggulan Dagang Indonesia. Diambil kembali dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia PPEI: <http://ppei.kemendag.go.id/produk-unggulan-indonesia>
- IDAffandi, H. A., Achmad Rozi, S. E., MM, C., & Sunarsi, D. (2021). *Manajemen SDM Strategik*. Bintang Visitama.
- Malik, A. A. (2020). *Politik Ekonomi Indonesia: Lanskap dan Dinamika Kontemporer*. Intrans Publishing.
- Mas'oeed, M. (2008). *Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan*. Pustaka Pelajar.
- Perkasa, G. A. (2019). Hubungan Indonesia Dan Tiongkok Pasca Diluncurkannya Kebijakan Luar Negeri Belt And Road Initiative (Bri) Tahun 2013-2018. <http://elibrary.unikom.ac.id>
- Petrus, D. (2023). Goodbye Dollar AS, BI dan Bank of Korea Teken Kerja Sama LCS. <https://www.theconomics.com/art-of-execution/goodbye-dollar-as-bi-dan-bank-of-korea-teken-kerja-sama-lcs/>
- Riyanto, B. (2015). Peran dan Tantangan Kerjasama Subregional dalam Mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA): Pendekatan Multilevel Governance. *Jurnal INSIGNIA*, 33-34
- Sabila., (2023). Goodbye Dollar AS, BI dan Bank of Korea Teken Kerja Sama LCS. <https://www.theconomics.com/art-of-execution/goodbye-dollar-as-bi-dan-bank-of-korea-teken-kerja-sama-lcs/>
- Wijayanti, Y., & Sudarmiani. (2017). Pengaruh tingkat inflasi terhadap nilai tukar rupiah (Studi pada Bank Indonesia periode tahun 2011-2015). *EQUILIBRIUM : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, 5(1), 32–44. <https://doi.org/10.25273/EQUILIBRIUM.V5I1.1004>
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Zulkifli. (2014, Juli). Kerjasama Ekonomi Internasional Sebagai Solusi Rjasama Ekonomi Internasional Sebagai Solusi. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* , 3, 139-158.